

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Program Keluarga Harapan

Menurut Jones dalam Anggraini (2022:25) program adalah bagian penting dari sebuah kebijakan. PKH merupakan program lintas berbagai kementerian dan lembaga, dengan pelaku utamanya berasal dari badan perencanaan pembangunan nasional, Departemen sosial, departemen kesehatan, departemen pendidikan nasional, departemen agama, departemen komunikasi dan informatika, serta badan pusat statistika.

Menurut Haryati (2022:14) Program Keluarga Harapan adalah sebuah upaya perlindungan sosial yang menyediakan bantuan keuangan kepada rumah tangga miskin (RTM) dengan persyaratan dan bantuan yang telah ditetapkan oleh program tersebut. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi beban yang dirasakan oleh RTM, sementara tujuan jangka Panjangnya adalah untuk memutuskan siklus kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya, memberikan peluang bagi generasi mendatang untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Menurut Sutijatmi & Umaroh (2019:2) Program Keluarga Harapan berfokus pada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang menerima bantuan, memberikan akses yang lebih baik untuk layanan dasar kesehatan dan mengurangi ketidakmampuan serta isolasi sosial yang umumnya terjadi pada individu miskin. RTSM, sebagai penerima bantuan PKH, memiliki tanggung jawab tertentu terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Tanggung jawab ini termasuk pemeriksaan kesehatan ibu hamil, pemantauan kesehatan, pemberian nutrisi, dan imunisasi untuk anak balita. Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk menyekolahkan anak-anak mereka mulai dari sekolah dasar hingga tingkat menengah atas. Program PKH memberikan manfaat berupa efek pendapatan bagi RTSM dengan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Menurut Rohmi, dkk (2023:172) Tujuan utama PKH adalah memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan kualitas kesehatan, nutrisi,

pendidikan, serta kapasitas pendapatan anak di masa depan. Program ini juga memberikan jaminan bagi anak-anak terkait masa depan mereka. Tujuan umum dari PKH adalah mengurangi tingkat kemiskinan, serta mengubah perilaku rumah tangga miskin yang cenderung kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama di kalangan RTM.

Pada pedoman pelaksanaan PKH (2019) Program Keluarga Harapan memiliki beberapa tujuan yang meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat dengan memperluas akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin serta rentan.
- c. Menggalakkan perubahan perilaku dan mandiri pada keluarga penerima manfaat agar dapat memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- d. Menyisihkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- e. Memperkenalkan manfaat produk dan layanan keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Sasaran program keluarga harapan (PKH) adalah keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan dan rentan, tercatat dalam data terpadu program penanggulangan fakir miskin. Mereka memiliki focus pada aspek Kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Peserta program keluarga harapan (PKH) memiliki empat tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Anggota keluarga diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan di fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan pedoman Kesehatan untuk ibu hamil/menyusui dan anak usia 0 hingga 6 tahun.
- b. Anggota keluarga harus mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran minimal 85% dari hari belajar yang efektif bagi anak yang berusia 12 tahun dan harus wajib sekolah.
- c. Anggota keluarga diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kesejahteraan sosial yang diperlukan bagi keluarga dengan anggota lanjut

usia (60 tahun ke atas) dan/atau anggota keluarga yang memiliki disabilitas berat.

- d. Keluarga penerima manfaat diharapkan hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulannya.

Secara individu dalam keluarga penerima manfaat harus mematuhi tanggung jawab kepesertaan dalam PKH. Kepatuhan KPM PKH terhadap kewajiban mereka akan berpengaruh pada bantuan sosial yang diterima dan hal kepesertaan lainnya. KPM yang patuh terhadap kewajibannya akan memperoleh hak sesuai dengan peraturan program. Namun, KPM yang gagal memenuhi kewajibannya berisiko mengalami penangguhan atau bahkan penghentian bantuan sosial.

2.1.2 Peran Pendamping PKH

Menurut Sarwono (2011) dalam Sompie (2022:95) teori peran merupakan suatu konsep yang mencakup berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Selain digunakan dalam psikologi, asal mula teori peran dapat ditelusuri dalam sejarah sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, konsep peran diadopsi dari istilah yang berasal dari dunia teater. Dalam konteks teater, seorang aktor diharapkan untuk memainkan peran sebagai tokoh tertentu dan untuk bertindak sesuai dengan posisinya dalam peran tersebut. Pandangan ini menjadi dasar pembentukan berbagai teori peran yang mencoba menjelaskan hubungan dan perilaku manusia dalam berbagai konteks sosial.

Menurut Soekanto (2002) dalam Anggraini (2022:17) menjelaskan bahwa peran adalah dimensi dinamis dari posisi atau status seseorang. Ini mengindikasikan bahwa seseorang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisinya. Dalam sebuah struktur organisasi, setiap individu memiliki karakteristik unik dalam tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh organisasi atau lembaga masing-masing. Menurut Gibson (2002) dalam Anggraini (2022:17) peran merujuk pada keterlibatan seseorang dalam dua sistem yang berbeda, yang biasanya terkait dengan organisasi.

Menurut Ife (2016:558) dalam Sompie (2022:96) peran pendamping adalah memperluas kemampuan individu di masyarakat agar dapat mengorganisir dan

menentukan sendiri langkah-langkah yang diambil dalam meningkatkan kondisi kehidupan dan usaha mereka. Terdapat empat peran utama yang dimiliki oleh seorang pendamping. Yaitu;

1. Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif melibatkan usaha untuk memberikan bantuan dan penguatan kepada individu atau kelompok, sehingga mereka dapat mengoptimalkan potensi pribadi dan sumber daya untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan mengembangkan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jim Ife menjelaskan bahwa dalam peran fasilitatif terdapat tujuh peran khusus.

a. Animasi Sosial (Semangat Sosial)

Dalam melaksanakan fungsi animasi sosial atau semangat sosial, peran yang dapat dijalankan melibatkan memberikan semangat, memberikan dukungan untuk bangkit dan memberikan motivasi kepada seseorang untuk melakukan tindakan tertentu.

b. Mediasi dan Negosiasi

Ketika menjalankan program-program pemberdayaan Masyarakat atau lainnya. Seringkali dihadapi dengan konflik kepentingan dan konflik nilai. Dalam situasi konflik, peran mediator sangat penting untuk menyelesaikan masalah karena inti dari peran ini adalah menjadi penengah.

c. Pendukung

Dalam melaksanakan peran pendukung, tugas yang dapat dilakukan pendamping mencakup memberikan dukungan atau support agar individu yang menerima dukungan dapat pulih dan bangkit. Dukungan dari para pelaku perubahan menjadi sangat penting untuk dilakukan.

d. Pembangun Konsensus

Proses pembuatan konsensus merupakan tindakan lanjutan dari peran mediasi, dengan tujuan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat.

e. Fasilitator Kelompok

Fasilitator kelompok memiliki peran yang penting dalam membantu kelompok agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam proses pemberdayaan masyarakat.

f. Pemanfaatan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh pelaku perubahan untuk mengoptimalkan berbagai jenis sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang tersedia di dalam masyarakat dan lingkungannya.

g. Mengorganisasi

Peran ini melibatkan kemampuan pelaku perubahan dalam merencanakan hal-hal yang diperlukan dalam proses perubahan. Selain itu, pelaku perubahan perlu menentukan prioritas untuk hal-hal yang perlu diprioritaskan.

2. Peran Edukasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Lestari (2019:20) peran edukasi merujuk pada peran dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, atau dapat dijelaskan sebagai peran yang bersifat mendidik. Jim Ife menjelaskan bahwa ada empat peran dalam pelaksanaan peran edukasional.

a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat, langkah awalnya adalah menghubungkan individu dengan struktur yang lebih besar, seperti struktur sosial dan politik di sekitarnya. Hal ini bertujuan membantu individu melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas.

b. Memberikan Informasi

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, pelaku perubahan perlu memberikan informasi yang belum diketahui oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan harus relevan dan bermanfaat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

c. Mengkonfrontasi

Teknik konfrontasi sebaiknya digunakan sebagai langkah terakhir jika tidak ada solusi lain yang memungkinkan. Penggunaan Teknik ini harus dipertimbangkan dengan cermat karena dapat merugikan hubungan antara pelaku perubahan dan Masyarakat sasaran.

d. Pelatihan

Peran pelatihan adalah bagian dari peran edukasional yang lebih khusus, fokusnya adalah mengajarkan Masyarakat untuk melakukan suatu hal. Meskipun pelaku perubahan tidak selalu menjadi instruktur, mereka dapat bertindak sebagai penghubung untuk mencari tenaga ahli yang kompeten dalam memberikan pelatihan.

3. Peran Perwakilan

Peran representasi adalah peran yang digunakan untuk memperlihatkan berbagai peran seorang pekerja Masyarakat saat berinteraksi dengan pihak luar, dengan tujuan untuk kepentingan Masyarakat. Jim Ife mengkategorikan peran representasi menjadi enam bagian, yaitu:

a. Mendapatkan Sumber

Dalam konteks peran representasional, sumber yang dimaksud mencakup sumber pendanaan, tenaga, peluang lapangan pekerjaan, dan sumber lainnya. Kehadiran sumber eksternal tersebut dapat memberikan dukungan terhadap system sumber daya yang berasal dari Masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

b. Advokasi

Advokasi digunakan secara umum untuk membela kepentingan masyarakat yang mengalami penindasan dan marginalisasi. Dengan adanya advokasi, diharapkan hak-hak masyarakat dapat dipenuhi sepenuhnya.

c. Memanfaatkan Media Massa

Media massa dapat efektif digunakan sebagai alat pendukung untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemanfaatan media massa dapat melibatkan penyiaran berita atau promosi, baik melalui media cetak, elektronik, maupun internet.

d. Komunikasi Masyarakat

Keterlibatan dalam peran ini melibatkan partisipasi dalam pertemuan dengan LSM, pemerintah, dan kelompok lain yang dapat dianggap dapat mendukung usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Kerja Sama Jaringan

Membangun kerjasama melibatkan pengembangan hubungan dengan berbagai pihak dan Upaya untuk mendorong partisipasi dalam proses pemberdayaan.

f. Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman

Dalam menjalankan peran ini, asumsinya adalah masyarakat bukanlah pihak yang tidak mengetahui apa-apa, melainkan dianggap sebagai entitas yang memiliki potensi dan pengalaman yang dapat dipelajari.

4. Peran Teknis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Lestari (2019:24) peran teknis merujuk pada peran yang terkait dengan Teknik atau keterampilan. Seseorang pendamping harus memiliki keterampilan-keterampilan untuk melakukan pendampingan terhadap Masyarakat yang menjadi subjek pendampingannya. Jim Ife mengklasifikasikan peran teknis menjadi empat bagian, yaitu:

a. Pengumpulan dan Analisis Data

Tugas ini melibatkan penelitian dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk mengumpulkan data guna memahami permasalahan dan kebutuhan Masyarakat dengan akurat.

b. Penggunaan Komputer

Keterampilan dalam menggunakan computer diakui sebagai hal yang sangat penting saat ini, karena komputer telah menjadi bagian dari integral dari kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini essensial untuk mendukung berbagai kegiatan yang terkait dengan proses pemberdayaan

c. Presentasi Verbal dan Tertulis

Kemampuan untuk melakukan presentasi secara lisan dan tertulis menjadi keterampilan kunci dalam menyampaikan ide dan gagasan kepada Masyarakat serta

pihak-pihak lain yang berperan penting dalam proses pemberdayaan. Dalam hal ini, presentasi tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga melalui laporan yang bersifat komunikatif.

d. Pengendalian dan Manajemen Keuangan

Peran ini mencakup pencatatan keuangan, pengawasan pertanggungjawaban pengeluaran, pengawasan anggaran, dan kontrol keuangan lainnya yang terkait dengan proses pemberdayaan.

Menurut Nandini, dkk (2022:77) seorang pendamping memiliki peran sebagai seseorang yang berfungsi sebagai fasilitator untuk memberikan dukungan serta motivasi kepada masyarakat. Sebagai seorang fasilitator dalam konteks pendampingan sosial, mereka dapat membantu masyarakat yang mereka dampingi untuk memenuhi segala kewajiban mereka dalam berbagai kegiatan sosial yang mereka ikuti. Strategi pembangunan sosial yang diterapkan oleh pendamping PKH memiliki dampak yang signifikan dalam pelaksanaan pendampingan di lapangan. Sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam PKH, peran pendamping memerlukan kemampuan untuk menghubungkan serta memfasilitasi berbagai kepentingan yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat.

Oleh karena itu pendamping PKH, seperti yang diuraikan dalam peraturan menteri sosial republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dalam pasal 49 mengenai program keluarga harapan, melibatkan tiga kegiatan utama: fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Fungsi utama pendamping:

- 1) Peran pendamping PKH dalam memfasilitasi keluarga penerima manfaat, menurut Panggabean (1999) dalam Fadhillah (2021:6) mengungkapkan bahwa konsep fasilitasi dan peran fasilitator memiliki dimensi yang luas. Fasilitasi berasal dari kata *facilis* (dari Bahasa Perancis) yang berarti “memudahkan”, sehingga fasilitator adalah individu yang bertindak untuk mempermudah proses. Fasilitas sendiri merujuk pada semua hal yang dapat mempermudah dan melancarkan jalannya suatu kegiatan. Fasilitasi mencakup segala bentuk dukungan yang menjadi sarana untuk mendukung berbagai aktivitas dengan tujuan memperlancar proses kegiatan. Ini mencakup memberikan

pendampingan dan arahan dari pendamping PKH kepada kelompok penerima manfaat. Artinya melakukan tugas fasilitasi secara langsung maupun tidak langsung kepada keluarga manfaat saat program keluarga harapan berlangsung. Menurut Ahmad (2018) dalam Anggraini (2022:33) fasilitasi merujuk pada upaya untuk mempermudah akses dan mengurangi hambatan, serta memberikan bantuan untuk mengatasi kesulitan. Pendamping PKH bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas secara langsung maupun tidak langsung kepada keluarga penerima manfaat selama pelaksanaan program keluarga harapan di tingkat kecamatan, desa. Kegiatan fasilitasi mencakup sosialisasi, edukasi, respons terhadap aduan, serta pembinaan dan pengawasan.

- 2) Mediasi, menurut Rahmadi (2010) dalam Anggraini (2022:22) merupakan langkah untuk menyelesaikan konflik antara beberapa pihak melalui proses perundingan guna mencapai kesepakatan. Pendamping bertugas memediasi agar dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul di keluarga KPM, memfasilitasi akses terhadap sumber daya, dan membangun kerjasama dengan program lain selama pelaksanaan program keluarga harapan di tingkat kecamatan, desa. Kegiatan mediasi meliputi penyelesaian masalah yang dihadapi anggota.

Mediasi yang beragam untuk memberikan perlindungan kepada anggota keluarga penerima manfaat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan keluarga kpm, mengakses berbagai sumber daya seperti teknologi, dana, dan informasi program, serta membangun koneksi dan kolaborasi dengan program lain selama pelaksanaan program keluarga harapan. Pekerja sosial sering berperan sebagai mediator dalam situasi pertolongan yang beragam. Peran ini aktif saat ada situasi ketegangan dan konflik antara anggota. Tugas mediasi dijalankan oleh fasilitator untuk meredakan perbedaan dan menggabungkan sumber daya yang tersedia untuk mendorong terwujudnya perdamaian.

- 3) Menurut Notoatmodjo dalam Anggraini (2022:22) advokasi mengacu pada upaya pendekatan terhadap pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh dalam kesuksesan suatu program atau kegiatan tertentu. Pendamping melakukan kegiatan advokasi sebagai representasi KPM untuk memastikan pemutakhiran

data anggota KPM, memverifikasi data-data tersebut, serta membimbing KPM menuju peningkatan. Kegiatan advokasi meliputi memastikan penerima bantuan sesuai kriteria, menjamin bantuan tepat sasaran dan sesuai aturan, serta membantu penerima PKH mendapatkan bantuan komplementer.

Menurut Zhahrah (2021:5) Pendamping dalam bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi KPM. Mereka menyampaikan materi tentang aspek-aspek seperti pengasuhan, pendidikan dan perlindungan anak. Dalam interaksi dengan KPM, pendamping berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka terkait pendidikan, memberikan dorongan agar lebih menyadari betapa pentingnya pendidikan. Melalui motivasi ini, pendamping bertujuan mendorong KPM agar memiliki pandangan yang lebih luas dan terbuka. Hasilnya, orang tua yang sebelumnya kurang memperhatikan pendidikan anak-anak mereka akhirnya turut terlibat dalam mendukung kemajuan pendidikan anak-anak mereka.

2.1.3 Pendidikan

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan merupakan upaya yang sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi mereka secara aktif. Tujuannya adalah agar mereka memiliki kekuatan spiritual, kontrol diri, perkembangan kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, serta keterampilan yang diperlukan bagi diri mereka sendiri dan Masyarakat.

Menurut Ahmadi dan Uhbiyati (2007:70) dalam Hidayat dan Abdilah (2019:24) pendidikan sebenarnya adalah proses yang disengaja dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dengan tujuan mendorong interaksi antara keduanya, memungkinkan anak mencapai kedewasaan yang diharapkan, dan berlangsung secara keberlanjutan.

Anwar (2015, hlm 123) menyatakan bahwa dalam era modern saat ini, dikenal sebagai abad cyhemetica, peran pendidikan dalam kehidupan manusia diakui sebagai kekuatan yang memiliki pengaruh besar (*education as power*) dalam menentukan tingkat prestasi dan produktivitas di berbagai bidang lainnya. Karena menurut Theodore Brameld dalam (Anwar, 2015) pendidikan sebagai kekuatan

memiliki otoritas signifikan bagi individu dan masyarakat untuk menentukan visi dunia yang diinginkan dan strategi mencapainya.

Menurut Hidayat dan Abdilah (2019, hlm 25) tujuan pendidikan merupakan elemen yang sangat krusial dalam konteks pendidikan, karena ia menandai arah yang ingin dicapai atau dituju oleh system pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan tak dapat terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, dan hal ini tercermin dalam pengalaman pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan pada era orde lama berbeda dengan periode orde baru. Mulai dari masa orde baru hingga saat ini, konsepsi mengenai tujuan pendidikan senantiasa berubah sesuai dengan tuntutan pembangunan serta evolusi kehidupan sosial dan politik di Indonesia.

Menurut pasal 3 dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, tujuan utama dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga mereka dapat menjadi individu yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sehat, berpengetahuan luas, kreatif, cakap, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Menurut Hidayat dan Abdilah (2019, hlm 25) ruang lingkup pendidikan sangatlah luas karena melibatkan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Objek dari ilmu pendidikan ini adalah situasi pendidikan yang terdapat dalam pengalaman dunia. Beberapa bagian penting dalam ruang lingkup ilmu pendidikan antara lain:

a) Tindakan pendidikan sendiri

Ini mencakup segala kegiatan, tindakan, atau sikap yang dilakukan oleh seorang pendidik ketika mengasuh atau membimbing peserta didik. Ini bisa berupa tindakan menuntun, membimbing, atau memberikan bantuan kepada peserta didik menuju tujuan pendidikan.

b) Peserta didik

Mereka adalah pihak yang menjadi fokus utama dalam pendidikan. Semua tindakan pendidikan dilakukan untuk membawa peserta didik menuju tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan islam, mereka dapat

disebut dengan berbagai istilah seperti siswa, mahasiswa, santri, talib, mutaalim, muhazab, dan tilmiz.

c) Dasar dan tujuan pendidikan

Ini menjadi landasan utama serta sumber dari semua kegiatan pendidikan. Implementasi pendidikan harus berakar pada dasar tersebut. Tujuan pendidikan pada dasarnya ingin membentuk peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan memiliki kepribadian yang baik.

d) Pendidik

Merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan pendidikan. Peran pendidik sangat berpengaruh terhadap hasil pendidikan, Dimana mereka dikenal dengan berbagai istilah seperti guru, dosen, mu'allim, muhazib, ustadz, kyai, dan lain sebagainya. Terkadang mereka juga disebut sebagai mursyid yang memberikan petunjuk kepada anak didik.

e) Materi pendidikan

Merujuk pada bahan atau pengalaman belajar yang disusun secara logis untuk disajikan kepada peserta didik. Dalam konteks pendidikan islam, materi ini sering disebut sebagai maddatut tarbiyah.

f) Metode pendidikan

Adalah cara atau teknik yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang tercantum dalam silabus mata pelajaran.

g) Evaluasi pendidikan

Mencakup cara-cara untuk menilai hasil belajar peserta didik. Tujuan pendidikan tidak tercapai secara langsung, melainkan melalui proses atau tahapan tertentu. Evaluasi ini meliputi sikap dan pengalaman pribadi peserta didik terhadap tuhan, masyarakat, lingkungan sekitar, serta dalam peran mereka sebagai individu dan anggota masyarakat.

h) Alat pendidikan

Mencakup segala yang mendukung terlaksananya proses mendidik. Alat pendidikan terbagi menjadi dua jenis, yaitu material seperti papan tulis, dan non material seperti keadaan atau situasi yang disengaja sebagai sarana pendidikan

i) Lingkungan pendidikan

Mengacu pada semua hal di sekitar manusia, termasuk benda mati, makhluk hidup, peristiwa, dan kondisi masyarakat yang dapat berpengaruh pada individu. Ini termasuk lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan tempat anak bergaul, yang disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan karakteristiknya.

Menurut Nasution (2004) dalam Ladaria, dkk (2020:2) konsep pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mencapai posisi yang lebih baik dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh, semakin besar harapan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan status sosial ke Tingkat yang lebih tinggi. Menurut Ladaria, dkk (2020:3) pendidikan dianggap sebagai peluang untuk berpindah dari suatu golongan ke golongan yang memiliki status lebih tinggi.

Menurut Christoper J. Lucas dalam Nugraha (2019:28) pendidikan memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menciptakan dampak menyeluruh pada lingkungan hidup dan memberikan informasi berharga mengenai mitra hidup di masa depan. Pendidikan juga membantu siswa/i dalam mempersiapkan kebutuhan yang sangat penting untuk menghadapi perubahan yang terjadi di dunia.

Kesadaran berkembang dari pengalaman yang dihadapi, dan diharapkan akan menciptakan perilaku kritis pada anak didik. Menurut Freire dalam Husni (2020:44) mengidentifikasi empat tingkatan kesadaran manusia:

- a. Kesadaran Intransitif, di mana seseorang hanya fokus pada kebutuhan fisik dan tidak menyadari sejarah, terjebak dalam masa kini yang menindas.
- b. Kesadaran Semi Intransitif, atau kesadaran magis, terjadi pada masyarakat yang tertutup dan berbudaya bisu. Ciri khasnya adalah fatalistik, di mana hidup berarti bergantung pada kekuasaan orang lain.
- c. Kesadara Naif, tingkatan di mana ada kemampuan untuk mempertanyakan realitas, tetapi masih ditandai dengan sikap primitif dan naif, seperti identifikasi dengan elite, pengulangan masa lalu, serta kecenderungan menerima penjelasan yang sudah ada tanpa refleksi. Interaksi seringkali lebih polemik dan berdebat, bukan dialog.

d. Kesadaran Kritis Transitatif, ditandai dengan kemampuan mendalam dalam menafsirkan masalah, percaya diri dalam berdiskusi, serta mampu menerima dan menolak ide-ide. Komunikasi bersifat dialogis. Pada tingkat ini, seseorang mampu merefleksikan dan melihat hubungan sebab-akibat dalam konteks yang lebih luas.

Menurut Susanto (2009:83) salah satu figure pendidikan berstandar internasional yang gigih dalam melawan pola dehumanisasi dalam konteks pendidikan adalah Paulo Freire. Dalam karyanya yang terkenal, "*Pedagogy of the Oppressed*", ia mengamati dampak dehumanisasi yang sangat serius terhadap kehidupan manusia. Baginya, kesadaran dan pemahaman adalah elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan.

Menurut Susanto (2009:83) dapat disampaikan bahwa Paulo Freire adalah seorang pendidik yang menyoroti pentingnya kesadaran dan pemahaman dalam pendidikan untuk membentuk individu yang sepenuhnya manusiawi. Menurut Freire dalam Susanto (2009:83) kesadaran bukan hanya sebuah alat, melainkan juga merupakan tujuan utama dari proses pendidikan itu sendiri. Kesadaran memungkinkan manusia melihat dunia sebagai perantara, karena manusia adalah makhluk yang sadar akan ketidaksempurnaannya dan sekaligus berusaha untuk menjadi lebih manusiawi.

Menurut Ladaria (2020:6) secara epistemologis, kesadaran mengacu pada kesadaran individu terhadap nilai-nilai dirinya yang muncul akibat perlakuan yang tidak adil. Ini mencakup pemahaman atau pengalaman seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti kesadaran akan eksistensinya yang timbul karena perlakuan yang tidak adil. Secara epistemologis, kesadaran dapat diartikan sebagai respons yang meliputi pengetahuan, pemahaman, kesadaran diri, serta tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Syafruddin, dkk (2019:260) pendidikan memiliki peran krusial dalam kemajuan masyarakat untuk meningkatkan kapabilitasnya. Pendidikan memberikan kesadaran kepada individu dan komunitas, memengaruhi kemampuan mereka dalam kegiatan pemberdayaan. Konsep ini sejalan dengan arguman yang diajukan oleh Hughey et al (2008) dalam Syafruddin (2019:260) bahwa kesadaran

Masyarakat berperan dalam proses pemberdayaan. Secara bersamaan, menggabungkan kegiatan yang memperkuat keterikatan pada Tingkat individu, organisasi, masyarakat, dan relasi luar organisasi dapat meningkatkan pemberdayaan.

Menurut Ladaria, dkk (2020:3) kesadaran akan pentingnya pendidikan yang diapresiasi oleh semua pihak dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia dilihat dari partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pendidikan, akses pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, keterlibatan masyarakat. Peran aktif dari pemerintah, masyarakat, guru, dan orang tua memiliki nilai signifikansi dalam kemajuan sistem pendidikan di Indonesia. Keluarga, sebagai lingkungan pendidikan primer, memiliki peran sentral di mana orang tua berperan sebagai pendidik yang memberikan arahan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal pendidikan.

Memahami betapa pentingnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, menjadi salah satu asset yang dibutuhkan bagi perkembangan anak dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya, selain dari faktor internal yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, tantangan utama bagi anak dalam mengejar pendidikan lebih tinggi adalah faktor eksternal, khususnya kesadaran masyarakat, terutama orang tua atau keluarga, terhadap pentingnya pendidikan.

Menurut Mahuda, dkk (2022:145) pendidikan dianggap penting sebagai kebutuhan esensial bagi setiap individu. Hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan posisi dalam komunitas. Peran penting pendidikan juga tercermin dalam kemajuan suatu negara. Melalui pendidikan, sebuah bangsa dapat ditingkatkan kecerdasannya, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memperkuat identitas bangsa. Secara lebih khusus, pendidikan berperan penting dalam membuka potensi individu untuk mewujudkan impian dan aspirasi mereka.

Menurut Syariffudin (2021:261) Kesadaran tentang pendidikan yang dapat disebarkan kepada semua segmen masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena pendidikan memiliki

peran penting dalam memberikan harapan dan peluang masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Diharapkan bahwa melalui pendidikan, kita dapat mengubah kualitas hidup manusia, meningkatkan tingkat pengetahuan, serta membentuk generasi yang lebih cerdas untuk masa depan yang lebih baik.

Menurut Syariffudin (2021:260) pendidikan memegang peran sentral dalam kehidupan manusia, karena melalui proses pendidikan ini, manusia mengalami transformasi dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan yang lebih luas. Lebih dari itu, proses pendidikan meningkatkan taraf manusia menjadi lebih tinggi, karena dalamnya ia memperoleh nilai-nilai yang mulia, yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang unggul di antara makhluk lainnya.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

1) Penelitian Putri Purwanti (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Purwanti (2022) yang berjudul “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Magelang Selatan”. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan peran pendamping dalam program keluarga harapan untuk memberdayakan masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu di wilayah kecamatan Magelang Selatan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menjelaskan factor-faktor yang mendukung serta menghambat kegiatan pendampingan dalam Upaya pemberdayaan Masyarakat miskin melalui program keluarga harapan di kecamatan magelang Selatan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri Purwanti (2022) didapatkan hasil penelitian bahwa pendamping menggunakan metode penyampaian seperti presentasi dan media pembelajaran lainnya, untuk memastikan anggota KPM dapat dengan baik menyerap informasi yang disampaikan. Pendamping PKH memfokuskan perannya sebagai fasilitator, pendidik, penghubung, dan teknisi, mereka bertugas memberikan motivasi, dukungan, pengetahuan, pelatihan, serta memfasilitasi interaksi antara pendamping dan lembaga eksternal untuk membantu anggota KPM. Dari segi factor pendukung dan penghambat kegiatan pendampingan

yaitu faktor pendukung meliputi dukungan dari Dinas Sosial, lokasi yang mudah dijangkau, kepercayaan anggota KPM kepada pendamping, evaluasi kritis dari anggota KPM, dan Kerjasama tim. Namun, jumlah KPM yang tidak proporsional dengan jumlah pendamping menjadi salah satu factor penghambat, mengakibatkan pendampingan yang kurang intensif dan sulitnya mengatur jadwal pertemuan.

2) Penelitian Vivi Anggraini (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Anggraini (2022) yang berjudul “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Lalu mengidentifikasi factor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Vivi Anggraini (2022) didapatkan hasil penelitian bahwa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan tambang, Kabupaten Kampar belum mencapai tingkat optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping, hanya dilakukan sekali dalam sebulan,. Selain itu, masih ada anggota keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang memiliki pengetahuan minim tentang tujuan dari program PKH sehingga tidak dapat menyebutkan dengan jelas apa tujuan dari program tersebut. Keluhan juga masih muncul terkait bantuan PKH yang belum cair meskipun telah direvisi datanya, dan masih terjadi penyaluran bantuan kepada KPM yang sebenarnya sudah mampu secara ekonomi.

3) Penelitian Nurliani, Jamaludin dan Rahma Hayati (2020)

Penelitian yang dilakukan Penelitian Nurliani, Jamaludin dan Rahma Hayati (2020) dengan judul “Impelementasi Program Keluarga Harapan pada Bidang Pendidikan di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong”. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami pelaksanaan

program keluarga harapan dalam sektor pendidikan di Desa Bongkang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Nurliani, Jamaludin dan Rahma Hayati (2020) didapatkan hasil penelitian bahwa penetapan peserta PKH dalam bidang pendidikan di Desa Bongkang dianggap sudah cukup terimplementasi. Proses validasi data peserta PKH telah berjalan dengan baik, meskipun pada tahun 2019 terdapat ketidakadilan dalam penghentian peserta yang sudah mampu dan belum mampu. Pendampingan dalam pelaksanaan program PKH di bidang pendidikan dinilai cukup terimplementasi. Meskipun telah ada pertemuan dan pelatihan, peserta masih kurang bijak dalam menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

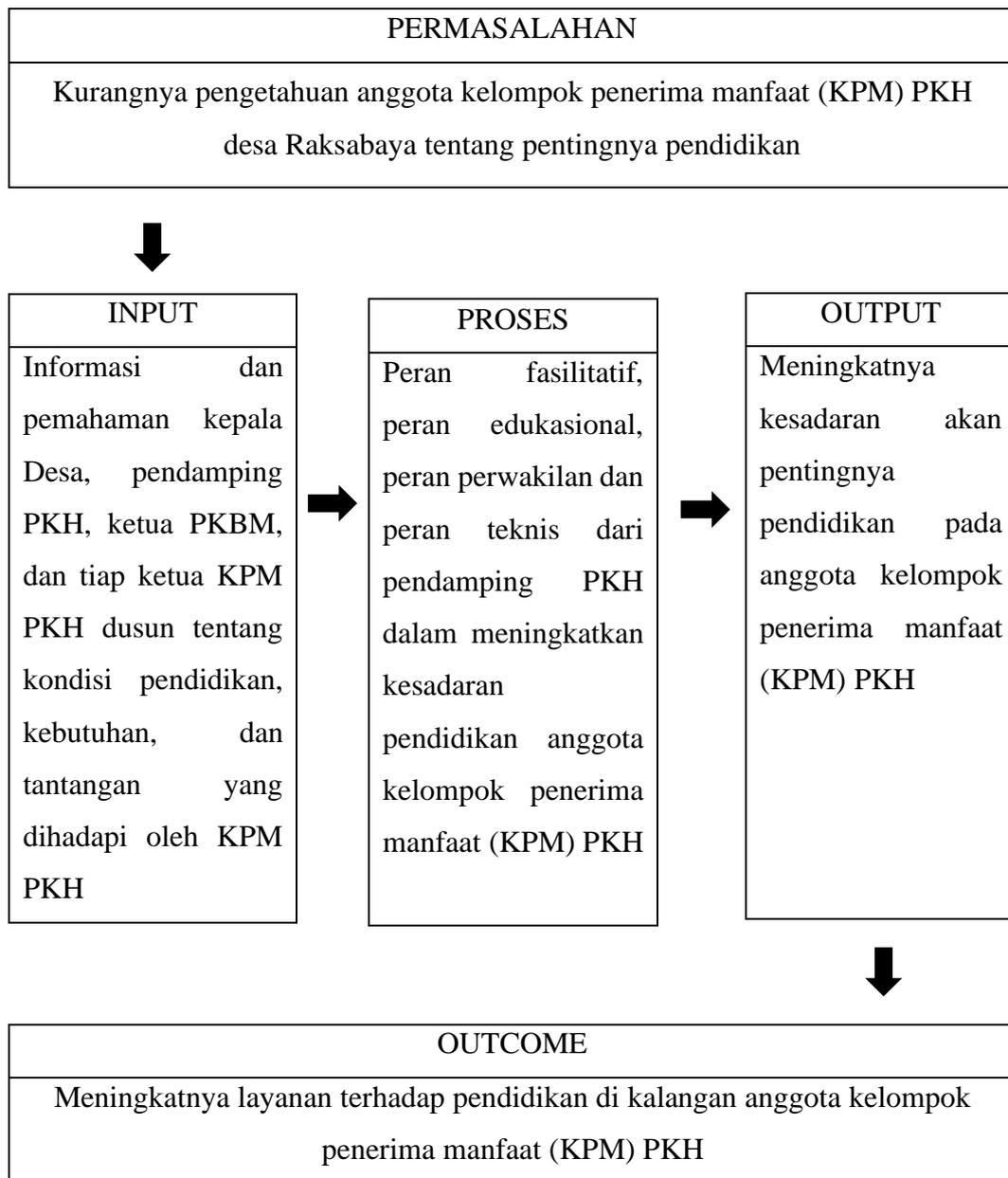
2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menitikberatkan pada peran pendamping PKH di desa raksabaya dalam meningkatkan layanan pendidikan pada anggota kelompok penerima manfaat. Pendamping PKH ini merupakan figur masyarakat yang dihormati dan dipercayai oleh masyarakat sebagai individual yang memiliki pengaruh besar di komunitas mereka. Dalam teori Ife tentang peran pendamping, fokusnya adalah untuk memperluas kapasitas individu dalam masyarakat sehingga mereka mampu mengorganisir dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan usaha mereka. Terdapat empat peran utama yang dimainkan oleh seorang pendamping, yakni peran fasilitatif, peran edukasional, peran perwakilan, dan peran teknis. Peran-peran ini memiliki dampak yang signifikan dalam memberikan pemahaman kepada anggota KPM, terutama dalam hal pentingnya pendidikan. Melalui pemahaman mendalam tentang kondisi, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh KPM PKH dalam bidang pendidikan, pendamping PKH dapat merancang strategi yang sesuai dan efektif.

Pendamping PKH akan menjadi jembatan yang menghubungkan antara KPM PKH dengan sumber daya pendidikan yang tersedia, memfasilitasi akses yang lebih baik, memberikan bimbingan, serta menawarkan solusi-solusi yang sesuai dengan situasi masing-masing individu atau keluarga KPM PKH. Dengan pendekatan yang

terarah dan responsif terhadap kebutuhan ini, pendamping PKH dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan bagi KPM PKH di Desa Raksabaya.

Proses penyebaran informasi yang dilakukan oleh pendamping PKH berperan sebagai pemicu bagi anggota kelompok penerima manfaat dalam memberikan kesadaran pendidikan untuknya. Melalui upaya komunikasi massal yang dikerjakan oleh pendamping terkait pendidikan, akan meningkatkan kesadaran pendidikan secara umum pada kelompok penerima manfaat. Hal ini berpotensi menghasilkan perubahan sosial, yang terlihat jelas dalam konteks permasalahan rendahnya angka partisipasi ibu-ibu kpm untuk melanjutkan pendidikan. Penelitian ini didasari pada keterbatasan kelompok penerima manfaat mengakses pendidikan di desa raksabaya. Penelitian ini fokus mengkaji peran dari pendamping PKH dalam meningkatkan kesadaran pendidikan pada kelompok penerima manfaat. Dalam Teori Paulo Freire mengenai kesadaran pendidikan, menurutnya kesadaran dan pemahaman dalam pendidikan sangat penting untuk membentuk individu yang sepenuhnya manusiawi. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah meningkatnya kesadaran pendidikan dilihat keinginan untuk melanjutkan kembali pendidikan. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah terciptanya kesadaran anggota kelompok penerima manfaat akan pentingnya pendidikan bagi mereka dan anak-anaknya.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, data diperlukan sebagai landasan. Untuk mengumpulkan data yang relevan, peneliti mengusulkan pertanyaan Bagaimana peran pendamping PKH dalam meningkatkan layanan pendidikan.